



KABAR TPB.

Susunan Redaksi | Penasehat : UCLG ASPAC - APEKSI, | Kontributor : Sri Indah Wibi Nastiti (SIW), Aniessa Delima Sari (ADS), Hendra Susila Adi (HSA), Andi Nur Fitri (ANF), Sitti Aminah Syahidah (SAS). Kontributor Tamu: Naeli Fitria (NF)

KABAR TPB

Kabar TPB adalah salah satu media informasi dari program LOCALISE SDGs, sebuah program kolaborasi UCLG-ASPAC dan APEKSI dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa, dalam menyampaikan informasi terkait dinamika pelaksanaan TPB/SDGs kepada rekan-rekan mitra LOCALISE SDGs (16 provinsi, 14 kota dan lima asosiasi pemerintah daerah), serta pemerintah daerah non-mitra, dan aktor non-pemerintah (mitra pembangunan, filantropi, akademisi, media dan masyarakat).

Informasi pada Kabar TPB dapat bersumber dari tim program, asosiasi pemda dan pemerintah daerah. Kabar TPB juga adalah upaya kami untuk menyampaikan berbagai informasi perkembangan kebijakan, praktik baik dan inovatif pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang bekerja untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kami mengundang para pembaca untuk menyampaikan kritik, saran, maupun kontribusi berupa artikel dan foto yang dilengkapi dengan caption terkait pelaksanaan TPB melalui email: kabartpb@uclg-aspac. Kabar TPB dapat diakses melalui kabartpb@uclg-aspac.org dan FB: localise.sdgs

HEADLINE

INKLUSIFITAS SEBAGAI KUNCI PEMBANGUNAN INDONESIA

“*No one left behind*” menjadi kata kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Norma yang hendak diciptakan masyarakat internasional berupa kesetaraan pencapaian dalam segala bidang ini mendorong TPB menjadi akar indikator atau alat ukur pencapaian tujuan-tujuannya. Dalam tujuh belas TPB yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, upaya ini juga bertujuan untuk menyaraskan elemen terkecil dalam sebuah negara. Secara global, TPB dibentuk untuk membawa perubahan dunia secara menyeluruh; “no” dalam hal kemiskinan, kelaparan, AIDS dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Penyempurnaan dari *Millenium Development Goals (MDGs)* ini diadopsi dan diterima oleh negara anggota PBB pada tahun 2015 dan diharapkan tujuan-tujuan dalam TPB ini tercapai paling lambat di

tahun 2030. Ini berarti, kita semua hanya punya sepuluh tahun lagi untuk melakukan pekerjaan besar untuk mencapai TPB dan pekerjaan ini tidak mungkin bisa terwujud tanpa kerjasama multi-pihak dan partisipasi seluruh elemen dan lapisan masyarakat. Bagi Indonesia, upaya pencapaian TPB berarti mencapai tujuan bersama dengan melibatkan elemen terkecil yaitu mulai dari RT dan RW ke tingkat pemerintah kota/daerah/kabupaten hingga ke level nasional. Upaya untuk mencapai TPB di 2030 ini tentu menjadikan negara sebagai aktor utama penentu keberhasilan. Pendekatan yang digunakan di Indonesia juga didukung dengan karakteristik sistem pemerintahannya yaitu otonomi daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki hak untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam, manusia, teknologi dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari alur pencapaian TPB di Indonesia, negara sebagai payung yang bertugas mengkoordinasikan implementasi di berbagai tingkatan, termasuk hingga tingkat dasar atau *grassroot* yang harus menyentuh hingga level masyarakat. Tidak lain

karena TPB disusun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mencakup hak-hak dasar atau hak asasi manusia. Sebagai contoh yaitu dalam bidang Pendidikan, yang secara spesifik memberikan kontribusi pada upaya pencapaian TPB 4 yaitu "Pendidikan Berkualitas", yang salah satu targetnya adalah akses yang sama ke semua tingkat pendidikan termasuk penyandang disabilitas serta membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang bersifat aman, inklusif dan efektif untuk semua.

Di Indonesia, Kota Metro, Provinsi Lampung misalnya, telah berproses melakukan penyelenggaraan pendidikan inklusif sejak tahun 2013, untuk menumbuhkan kesadaran orangtua penyandang disabilitas supaya lebih terbuka untuk memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam pemenuhan pendidikan tanpa rasa malu dan tertutup. Pemerintah Kota Metro awalnya merekomendasikan 18 sekolah percontohan untuk melakukan pendidikan inklusif dari setiap jenjang untuk mengintegrasikan kebutuhan ABK dalam penyelenggaraan pendidikan reguler, mendidik 30 orang guru untuk menjadi guru pembimbing khusus yang terus bertambah seiring dengan kebutuhan tenaga pendidik, dan mendirikan 1 (satu) SLB Negeri dan 2 (dua) SLB swasta¹. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini sudah masuk ke dalam komitmen Pemerintah Kota Metro sebagai kota inklusif di Dokumen RPJM Kota Metro Tahun 2016 – 2021, dan ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendidikan Inklusif Ramah Anak. Adanya peraturan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak untuk memberikan kesempatan seluas mungkin bagi ABK dan memastikan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), dasar, hingga

pendidikan menengah. ABK disini tidak hanya mencakup penyandang disabilitas, tapi juga anak dengan kondisi khusus (yatim piatu, terlantar, terkena dampak HIV/AIDS, korban perdagangan manusia, kekerasan dsb). Hal ini termasuk menjamin penyediaan tenaga pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk meningkatkan kompetensi pendidik, dan penyediaan fasilitas sarana prasana pendidikan inklusif. Walaupun inisiatif pendidikan inklusi telah juga banyak dilakukan di Indonesia, baru sekitar 11 persen dari sekolah-sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan inklusif², sehingga upaya akselerasi TPB dalam sektor pendidikan ini menjadi sangat penting.

Contoh lain penerapan dari *No One Left Behind* ini juga dapat ditemui dalam pelibatan perempuan pada konteks perumusan program pembangunan di tingkat desa. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*) pada tanggal 24 Juli 1984, Indonesia mempunyai komitmen untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan sekaligus mempromosikan pengarusutamaan gender dan pelibatan perempuan dalam proses pembangunan. Salah satu Undang Undang yang menjamin pelibatan perempuan dalam perumusan program pembangunan adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa adalah sebuah pengejawantahan program Nawacita yang termaktub dalam butir 3 yang berbunyi: "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Selain merefleksikan semangat *No One Left Behind* dari TPB, UU Desa menjamin

pelibatan perempuan dalam proses pembangunan di tingkat pemerintahan terkecil seperti termaktub dalam pasal 54 ayat 1 yang berbunyi "Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Selanjutnya Ayat 2 Pasal 54 UU Desa menjelaskan hal strategis yang dimaksud dalam ayat 1 adalah penataan Desa, perencanaan desa, kerja sama Desa, rencana investasi di Desa, pembentukan badan usaha di Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa dan kejadian luar biasa yang terjadi di Desa. Dalam Penjelasan Pasal 54 UU Desa yang dimaksud unsur masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat miskin, kelompok difabel, kelompok tani, dan lain-lain termasuk kelompok perempuan.

Jaminan dari tak seorangpun yang tertinggal, termasuk kelompok perempuan, dalam seluruh proses pembangunan dan menikmati hasil pembangunan seperti yang telah diamanatkan dalam Nawacita dan UU Desa perlu terus didorong dan dikawal oleh seluruh elemen masyarakat. Pemajuan hak perempuan pada seluruh aspek pembangunan dan perikehidupan bernegara adalah cermin dari pemenuhan komitmen Pemerintah dalam pencapaian TPB, sekaligus sebagai upaya terstruktur dan sistematis dalam menghormati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dari kelompok perempuan utamanya di Desa. (NF, ADS, HSA)

1 Best Practice Kota-Kota Indonesia APEKSI Jilid 12, 2017



FORUM KEMITRAAN MULTI-PIHAK UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TPB/SDGS: MENDORONG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH INKLUSIF



Pemerintah daerah menghadapi situasi yang semakin dinamis dan perubahan tantangan dalam menghadapi permasalahan urbanisasi. Adapun tantangan yang dimaksud mencakup perubahan populasi, demografi, dan iklim, tidak menentunya pemasukan, serta tidak meratanya distribusi ekonomi. Pemerintah daerah adalah ujung tombak dari implementasi pembangunan dan karenanya perlu untuk selalu beradaptasi dengan perubahan tantangan tersebut, yang telah ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Agenda Urban Baru (*the New Urban Agenda - NUA*).

Kerjasama kemitraan multi-pihak adalah salah satu perangkat dalam mencapai agenda tersebut, sesuai dengan yang ditekankan

dalam Tujuan 17 dalam TPB: Kemitraan untuk Tujuan dan juga sarana implementasi Agenda Baru Perkotaan, terutama dalam paragraf nomor 96 dan juga nomor 146. Dengan digunakannya prinsip dasar #NoOneLeftBehind, kemitraan multi-pihak akan memastikan seluruh aktor pembangunan, baik aktor negara maupun non-negara, bekerja bersama untuk mencapai agenda pembangunan yang ambisius dan transformatif. Dengan demikian, kerjasama kemitraan multi-pihak dapat menjadi bentuk nyata dari upaya pembangunan yang lebih inklusif.

Adapun upaya yang terlihat dari UCLG ASPAC dalam mendukung sepenuhnya kemitraan multi-pihak adalah dengan menggelar

Focus Group Discussion (FGD) satu hari yang bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh (APEKSI) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pendanaan yang berasal dari Uni Eropa dan diadakan pada 19 November 2019, serta bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengadakan forum kemitraan multi-pihak tingkat nasional di Indonesia pada 20 November 2019. FGD ini diadakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai pengalaman yang kolektif serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia dalam menginisiasi kerja sama internasional untuk turut mencapai TPB 17, termasuk

tantangan proses penyerahan aset. FGD ini juga mengidentifikasi berbagai kebutuhan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemitraan multi-pihak untuk TPB dan NUA, yang meliputi kebutuhan akan anggaran khusus dan pengaturan kelembagaan untuk kemitraan.

Forum nasional dengan judul Forum Kemitraan Multi-Pihak untuk Mendukung Pelaksanaan TPB/SDGs dihadiri oleh lebih dari 300 peserta yang berasal dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, pihak swasta, akademisi dan media. Forum ini dimulai dengan kata sambutan dari Bapak Slamet Soedarsono sebagai Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan diikuti dengan pidato utama dari Bapak Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan pidato dari Bapak Budi Arie Setiadi sebagai Deputi Kementerian Pedesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Bapak Suharso Monoarfa menekankan fungsi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pusat untuk kemitraan multi-pihak dan mengingatkan peserta akan perlunya menyelaraskan pekerjaannya dan memiliki keterkaitan dengan TPB sebagaimana Indonesia berkomitmen untuk mencapai TPB di tahun 2030. Beliau menekankan perlunya memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi untuk mengejar ketertinggalan akibat perubahan yang cepat dan tujuan yang kompleks. Tindakan adaptif semacam itu telah mulai dilakukan ketika pegawai kementerian menerapkan prinsip-prinsip kantor cerdas (*smart office principles*) dengan menggunakan rantai blok dan sistem *cloud* untuk meningkatkan pelayanan umum. Dalam skala yang lebih nyata, beliau memberikan contoh melalui kemitraan multi-pihak yang sedang berlangsung di Indonesia terkait hulu sungai Citarum, yang disebut Citarum

Harum untuk mengatasi polusi air dan puing-puing laut sejak 2018.

Bapak Budi Arie menunjukkan pentingnya kemitraan multi-pihak dalam TPB untuk pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah pedesaan yang berhubungan dengan pembangunan daerah perkotaan. Beliau memberikan contoh dalam penggunaan Dana Desa untuk membangun dan menerapkan teknologi dan inovasi di daerah pedesaan dalam pencapaian TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur). Teknologi dan inovasi semacam itu terbentuk melalui *Internet of Things* yang diterapkan untuk pertanian yang menguntungkan desa seperti dalam bentuk *drone sprayer* untuk pertanian, menerapkan sensor untuk air, tanah dan cuaca untuk meningkatkan produktivitas perikanan, dan sabuk kesehatan sapi untuk peternakan sapi. Kementerian juga telah memulai kemitraan dengan *startup* digital untuk membantu memastikan harga yang adil untuk petani, memastikan ketersediaan informasi melalui *streaming* konten yang gratis dan *offline* untuk daerah dengan sinyal internet yang buruk, dan upaya sosial yang bermitra dengan petani kecil. Upaya ini tidak hanya berpengaruh pada TPB 9, tetapi juga tujuan lain seperti TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 1 (Tidak Ada kemiskinan), TPB 10 (Mengurangi Kesenjangan) dan TPB 2 (Tidak Adanya Kelaparan).

Bapak Fadli Zon, sebagai Ketua Badan Kerja sama Antar-parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan dalam pidatonya bahwa semangat kemitraan multi-pihak dan implementasi TPB dalam aktivitas diplomasi mereka, Badan Kerja sama Antar-Parlemen telah memprakarsai Forum Parlemen Dunia untuk TPB dengan 50 negara anggota

di mana forum tersebut telah diselenggarakan sejak 2017. Sampai dengan 2019, forum ini telah mendiskusikan dan menyetujui beberapa isu tentang implementasi TPB termasuk meningkatkan kesadaran akan TPB, pengembangan kapasitas untuk anggota parlemen, kebutuhan akan kemitraan antara parlemen dan pemerintah tentang TPB dan mengurangi kesenjangan dengan memastikan pemberian pelayanan dasar untuk semuanya.

Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi sebagai Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC adalah salah satu narasumber dalam sesi Panel Tingkat Tinggi bersama Ibu Erna Witoelar, Duta Besar Khusus PBB untuk MDGs di Asia Pasifik (2003-2007) dan Wakil Ketua dari Filantropi Indonesia, Dr. Arifin Rudiyanto sebagai Deputi Sumber Daya Alam dan Kelautan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Taufik Madjid sebagai Direktur Jenderal Pengembangan dan Pemberdayaan Komunitas Desa, Kementerian Pedesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Bambang Widianto, sebagai Deputi untuk Bantuan Kebijakan Pengembangan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Bapak Harmensyah, sebagai Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Ibu Zuzy Anna, Direktur Eksekutif dari SDGs Center di Universitas Padjajaran. Dalam pidatonya, Dr. Bernadia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kemitraan multi-pihak untuk mempercepat pembangunan daerah serta mendukung pencapaian TPB di daerahnya. Kemitraan semacam itu dapat ditempuh melalui *Global Covenant of Mayors for Climate & Energy* (GCoM), sebuah koalisi pemerintah kota dan lokal yang memiliki

komitmen sukarela untuk melawan perubahan iklim secara aktif dan visi jangka panjang yang sama untuk bergerak menuju masa depan rendah emisi dan berketahtaan iklim, untuk meningkatkan komitmen dan kerja sama dalam pencapaian TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dimana UCLG ASPAC mewakili kawasan Asia Pasifik dan menjembatani pemerintah daerah dalam mengakses bantuan dan sumber daya.

Sesi panel tingkat tinggi diikuti dengan empat sesi tematik paralel tentang kemitraan multipihak dalam membangun kota inklusif, pengelolaan sampah laut, pengelolaan sumber daya air, dan percepatan transformasi pedesaan. UCLG ASPAC mengadakan sesi tematik paralel tentang kota inklusif dengan empat pembicara yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Kuswanto; Walikota Ambon, Bapak Richard Louhenapessy; Kepala Unit Ilmu Sosial dan Kemanusiaan dari UNESCO, Bapak Irakli Khodeli dan Ketua Tim Program Peduli dari Asia Foundation, Ibu Abdi Suryaningati. Bapak Kuswanto menjelaskan bahwa peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pengatur untuk mengatasi berbagai kebijakan dan peraturan yang diskriminatif sehingga semua orang dapat dengan sama berpartisipasi dan mendapatkan akses pelayanan umum. Peran Kemendagri lainnya adalah sebagai penilai akan proses perencanaan pembangunan pemerintah daerah untuk mengarusutamakan dan menerapkan prinsip-prinsip inklusif, tidak hanya berupa ketersediaan akses bagi para penyandang disabilitas dan kelompok yang terpinggirkan tetapi juga sikap pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan umum tanpa adanya diskriminasi.

Bapak Richard membagikan pengalamannya dalam memimpin Kota Ambon, yang dulunya dikenal sebagai kota yang mengalami banyak

konflik dan disintegrasi sosial. Namun, dengan upaya yang kolektif dari beragam pemangku kepentingan, kondisi kota dapat pulih kembali dan saat ini dikenal sebagai kota dengan tingkat toleransi yang tinggi dan bahkan baru saja diakui oleh UNESCO sebagai Kota Musik karena ciri khas budayanya yang unik.¹ Beliau mengangkat pentingnya pemimpin pemerintah daerah untuk sepenuhnya merangkul potensi kota mereka dan menciptakan lingkungan pendukung yang kondusif untuk memastikan semua orang dapat dengan mudah mengakses hak-hak mereka dan dengan senang menjalankan kewajibannya, yang menurut beliau adalah inti dari kota inklusif.

Bapak Irakli menjelaskan dukungan UNESCO melalui Jaringan Walikota untuk Kota Inklusif di Indonesia dan menggarisbawahi pentingnya bukti dan riset yang tersedia, dapat diakses serta dapat digunakan dalam pembuatan keputusan untuk kebijakan dan proses perencanaan. UNESCO telah membangun kemitraan dengan Yayasan Kota Kita tentang data yang partisipatif untuk kota inklusif disabilitas di Kota Solo dan Banjarmasin. Pemetaan disabilitas tingkat lingkungan dengan metodologi pengambilan data yang partisipatif telah menghasilkan profil kota inklusif disabilitas, perangkat metodologi pengumpulan data yang partisipatif, dan telah diikuti dengan pertemuan tingkat tinggi

walikota tentang kota inklusif untuk memfasilitasi pembelajaran dan komitmen bersama menuju kota inklusif.

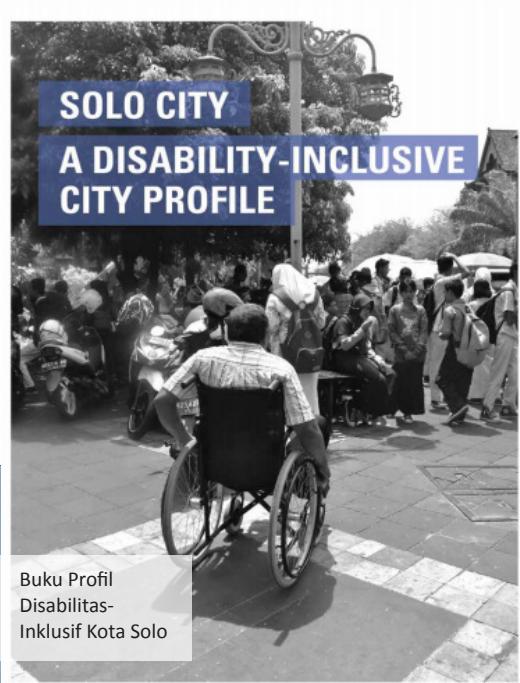
Ibu Abdi menekankan perlunya mengembangkan dan mengartikan dengan jelas kota inklusif, sebagaimana hal tersebut penting untuk mengakomodasi kebutuhan lainnya bagi penyandang disabilitas, dan juga kelompok yang terpinggirkan seperti kaum minoritas, anak-anak yang didiskriminasi karena terlahir di luar pernikahan, atau terjebak dalam prostitusi. Kemitraan multi-pihak penting untuk mengembangkan data yang sudah diperbarui dan komprehensif untuk kelompok yang terpinggirkan dan para penyandang disabilitas, untuk memberdayakan dan memenuhi hak asasi manusia yang mendasar dari kelompok tujuan tersebut, serta menyebarkan kesadaran. Upaya ini dapat melibatkan kader organisasi, pemimpin komunitas, dan organisasi masyarakat sipil sebagaimana yang dilakukan oleh Program Peduli dari The Asia Foundation.

Sebuah pernyataan resmi bersama menandakan berakhirnya acara sehari penuh yang menyatakan peran kemitraan multi-pihak dalam implementasi TPB, yaitu diperlukannya pendekatan untuk memajukan dukungan global dalam kemitraan multi-pihak untuk TPB dan aksi tindak lanjut strategi untuk mendukung Tahun Partisipasi Internasional pada tahun 2022. (ADS, SAS)



Sri Indah Wibi Nastiti, Direktur Eksekutif APEKSI memoderasi sesi Kota Inklusif sebagai bentuk kemitraan multipihak dalam mencapai TPB (Foto: Localise SDGs)

¹<https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/31/unesco-names-ambon-city-of-music.html>



KABAR DAERAH

UPAYA KOTA SOLO DAN KOTA BANJARMASIN MENUJU KOTA YANG INKLUSIF

Pembangunan yang inklusif dan 'Leave no one behind' adalah salah satu prinsip utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan semua pihak, terutama masyarakat dengan kebutuhan khusus, anak, perempuan, dan minoritas. Pembangunan yang inklusif juga perlu mempertimbangkan seluruh wilayah, termasuk wilayah-wilayah terluar di Indonesia. Target TPB yang secara eksplisit menyebutkan pentingnya inklusi antara lain adalah TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), TPB 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), TPB 16 (Perdamaian,

Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh).

Visi dari pembangunan kota yang inklusif ini setidaknya telah mulai banyak dilakukan di Indonesia, seperti di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Timur, dimana kedua provinsi tersebut adalah mitra LOCALISE SDGs. Kedua kota ini mulai mengembangkan profil kota inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas masing masing pada tahun 2018 dan 2019 dengan fasilitasi UNESCO dan bermitra dengan Yayasan Kota Kita. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menuju Kota Inklusif di Indonesia yang sudah dimulai sejak 2013 oleh UNESCO, lembaga PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. UNESCO mengawalinya dengan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah tentang penanganan penyandang disabilitas melalui program kota inklusif melalui UN Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities (UNPRPD).

Selama itu pula, UNESCO bersama beberapa pemerintah kota mulai membangun jejaring antar pemerintah kota yang aktif mengembangkan kota inklusif.

Melihat pentingnya penguatan jejaring yang telah terbangun tersebut, bekerja sama dengan APEKSI, UNESCO memfasilitasi pengembangan jejaring menjadi forum yang lebih terarah dalam bentuk kelompok kerja (pokja) bernama Pokja Menuju Kota Inklusif pada tahun 2017 yang kemudian dikelola oleh APEKSI.

Sampai saat ini ada 28 kota yang telah menandatangi Piagam Kota Inklusif yaitu: Banda Aceh, Padang, Metro, Yogyakarta, Mojokerto, Banjarmasin, Denpasar, Ambon, Tangerang Selatan, Jambi, Bengkulu, Solo, Kupang, Jakarta Pusat, Bontang, Tarakan, Salatiga, Banjarbaru, Pontianak, Bandung, Kediri, Samarinda, Palembang, Singkawang, Semarang, Bogor, Balikpapan, dan Makassar. APEKSI melalui Pokja Menuju Kota Inklusif atau Jaringan Walikota ini berupaya aktif membangun forum sharing

antar pemerintah kota dalam upaya mewujudkan kota yang inklusif. Selain itu, aktivitas lain yang dilakukan oleh Pokja Kota Inklusif adalah pendokumentasian berbagai best practices kota inklusif. UNESCO juga menyusun *assessment tools for inclusive cities* yang bertujuan membantu pemerintah daerah dalam mengukur kapasitasnya dan menyusun kebijakan/perencanaan untuk menjadi kota yang inklusif.

Kota Solo mengawali penyusunan profil kota inklusif dan menghasilkan data yang andal dan terpilah, yang sangat bermanfaat untuk membuat perencanaan kebijakan yang mempromosikan inklusi sosial kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Proses penyusunan profil data di Kota Solo dilakukan secara partisipatif, melibatkan semua

kelompok masyarakat khususnya rentan dan disabilitas sehingga tidak ada data yang terlewat. Dengan tersedianya profil kota disabilitas-inklusif ini maka diharapkan pemerintah kota akan lebih inovatif dalam mengembangkan program bagi semua masyarakat termasuk kelompok rentan – disabilitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Program ini kemudian direplikasi oleh Kota Banjarmasin dengan pemutakhiran data penduduk khususnya kelompok rentan – disabilitas. Data ini ternyata berguna untuk pemutakhiran data penduduk bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan data pemilih untuk pemilihan umum bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). (SIW, SAS)

TENTANG LOCALISE SDGs

Program LOCALISE SDGs adalah upaya bersama UCLG ASPAC dan APEKSI untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan asosiasi pemerintah daerah dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan dukungan finansial dari Uni Eropa. Program ini mencakup 16 provinsi, 14 kota di Indonesia serta lima asosiasi pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas yang dimaksud meliputi penyadaran, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi TPB. Selain mendukung akselerasi pencapaian seluruh TPB, program ini juga secara spesifik mendukung TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui Pelatihan Diplomasi Kota bagi pemerintah daerah anggota UCLG ASPAC untuk memperkuat kemampuan daerah dalam melakukan kerjasama untuk mencapai TPB. Informasi lebih lanjut terkait LOCALISE SDGs dapat diakses melalui www.localisesdgs-indonesia.org





11 PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA IKUTI PENINGKATAN KAPASITAS TPB DAN HAM DI KOREA SELATAN

Pemerintah Daerah, agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tiga kata kunci yang saling terkait, yang dapat diilustrasikan sebagai peran pemerintah daerah dalam menerapkan kota hak asasi manusia yang inklusif untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Guna memberikan pemahaman yang lebih baik bagi dan antar pemerintah daerah, serta untuk menciptakan jaringan yang semakin luas, Raoul Wallenberg Institute (RWI) dan UCLG ASPAC mengadakan kursus singkat tentang HAM dan TPB untuk pemerintah daerah di Gwangju, Korea Selatan. Kegiatan ini diadakan selama tiga hari, mulai dari 30 September hingga 2 Oktober 2019.

Perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Provinsi DKI Jakarta, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kota Yogyakarta, Kota Bogor, Kota Pontianak, Kota Gorontalo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Wonosobo turut mengikuti kegiatan

kursus singkat yang memadukan TPB dengan HAM di kota yang memiliki kenangan terhadap gerakan demokrasi dan hak asasi manusia ini. Perwakilan beberapa negara seperti Filipina, Nepal, Kiribati, Malaysia, Maladewa, juga turut serta dalam kursus yang bertempat di Kimdaejung Convention Center ini.

Kelas khusus untuk Pemerintah Daerah diawali dengan orientasi oleh Bapak Sebastian Saragih dari RWI. Menurutnya, HAM dan TPB memiliki keterpaduan yang saling melengkapi. Ketika pemerintah daerah berkomitmen untuk menjembatani prinsip-prinsip HAM dan TPB, maka akan memudahkan mereka untuk menemukan *positioning* dalam pelaksanaan pembangunan. Dimana prinsip-prinsip dasar HAM yaitu non-diskriminasi atau kesetaraan, inklusi atau partisipasi, serta transparansi atau akuntabilitas yang dapat dipadupadankan dalam penerapan indikator-indikator TPB.

Menurut Gabriella Frederikson dari RWI, selaku fasilitator utama dalam kursus singkat ini, sebenarnya tidak ada standar universal dalam perumusan kota hak asasi manusia, begitu pun sistem akreditasinya. Sebagai

contoh Kota Gwangju sebagai kota HAM, prinsip-prinsip HAMnya diadopsi sebagai dokumen kehidupan masyarakat untuk pembuatan kebijakan di tingkat kota. Beberapa contoh tentang kota HAM berskala internasional disebutkan antara lain : Rosario, Argentina (1990), Graz, Austria (2001), Utrecht, Belanda, (2010), York, Inggris(2017), Wien, Austria (2014), Bandung, Indonesia (2015), Richmond dan San Francisco, California, Amerika Serikat (2009), Gwangju City, Korea Selatan (2012) dan Lund, Swedia (2018).

Setelah memberikan penjelasan tentang HAM dan contoh-contohnya, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang kegiatan sehari-hari yang dikategorikan terkait dengan hak asasi secara individu. Setiap peserta memberikan contoh tiga hal, baik itu terkait pemenuhan hak asasi secara individu maupun pemenuhan terhadap hak asasi sekitarnya. Beragam jawaban muncul, mulai dari skala rumah tangga seperti hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak istri untuk bekerja, hak individu berupa kebebasan bereksresi hingga pada skala yang lebih luas sebagai warga negara misalnya

mendapatkan perlindungan hukum ketika tersandung masalah. Dari sesi *brainstorming* ini peserta kemudian memahami bahwa hak asasi manusia itu dapat ditunjukkan dari hal-hal sederhana dan dari lingkungan sendiri.

Dalam Sesi Plenari, Kabupaten Jember mewakili Indonesia memaparkan pengalaman mereka dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menjamin kebebasan beragama, dan penyetaraan kesempatan bagi para disabilitas. Usaha Dr. Faida Taib, sang Bupati menuai banyak kagum dari peserta yang tidak hanya dari Indonesia. Tekadnya untuk mengabdi kepada masyarakat diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan program seperti pendidikan yang setara bagi kaum difabel, kesempatan berusaha bagi para kaum muda, penyediaan ambulans bagi setiap kampung hingga pada dukungan terhadap toleransi beragama di kotanya. Ia menekankan bahwa ketika seorang pemimpin hendak menjalankan prinsip-prinsip HAM, maka akan memudahkan baginya untuk merealisasikan beberapa prioritas dari indikator TPB.

Selain Bupati Jember, dalam kursus singkat ini juga, peserta banyak belajar dari narasumber lain seperti Utrecht City, United Nation of Human Rights, IGES (Institute for Global Environment Strategy), dari Komisi Nasional HAM Indonesia, dan Kabupaten Wonosobo yang melengkapi penampilan Indonesia di kancah Internasional.

Sebagai penutup dari kursus singkat ini, peserta diminta untuk membuat rencana individu yang menggambarkan apa yang akan mereka lakukan dan implementasikan setelah kursus singkat tersebut. Dalam rencana individu tersebut peserta diharapkan mampu mengelaborasi integrasi hak asasi manusia dengan indikator TPB yang spesifik dengan program kerja masing-masing. (ANF)

REVIEW BUKU

Judul: Research on Progress, Potential and Best Strategy for Implementing and Expanding The Adoption of The Human Rights City Initiative Across Indonesia/ Riset Kemajuan, Potensi, dan Strategi Terbaik dalam Pelaksanaan dan Pengembangan Inisiatif Kota yang Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Tahun Publikasi: Desember 2018

Terbitan: International NGO Forum on Indonesia Development (INFID)

Jumlah Halaman: v + 57 hal.



Pelayanan dasar yang non-diskriminatif dan inklusif bagi publik merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh TPB. Salah satu indikasi bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip inklusif adalah adanya inisiatif dari kota dan kabupaten yang telah memperhatikan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia atau dikenal dengan Human Rights City Initiative.

Riset yang dilakukan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) ini bertujuan mendokumentasikan kemajuan inisiatif 100 kota dan kabupaten di Indonesia yang dianggap sudah mengadopsi konsep HAM dan telah mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak. Kemajuan inisiatif yang ditangkap mencakup kemauan dan komitmen dari pemerintah daerah dalam memenuhi HAM, bentuk pelaksanaan dan program/aspek HAM prioritas dari pemerintah daerah, dan upaya pemerintah daerah dalam mempromosikan,

memberikan perlindungan, dan memenuhi HAM yang tertuang dalam regulasi, struktur, dan budaya yang kondusif terhadap HAM. Pengumpulan data untuk riset ini dilakukan melalui survey, Focus Group Discussions (FGD) dan analisis terhadap setidaknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data Potensi Desa (podes), penghargaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, interview berbagai organisasi masyarakat sipil (ormas), dan berbagai artikel dari media cetak dan daring.

Dalam riset ini, INFID memilih sampel 100 kota/kabupaten, termasuk diantaranya Kota Balikpapan, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar, dengan berbagai kriteria, termasuk tujuh kriteria dalam pencapaian pemenuhan HAM oleh berbagai lembaga dan organisasi sambil mengupas lebih lanjut indikator-indikator yang diterapkan dan kemajuannya untuk menilai kesuksesan pelaksanaan konsep HAM. Instrumen-instrumen yang bisa digunakan oleh pemda untuk mewujudkan Kota HAM juga dibahas, seperti melalui regulasi dan pembiayaan, kegiatan publik dan kampanye, aktivitas budaya, penerapan kerangka kerja sistematis yang komprehensif untuk penerapan kota ramah HAM, dan mencantoh kota-kota yang sudah memiliki kesuksesan dalam penerapan konsep kota HAM. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan laporan riset ini sebagai dasar untuk terus berinovasi dan bergerak dalam menjamin pemenuhan hak dasar bagi seluruh warganya dan memastikan proses yang inklusif dalam upaya mencapai TPB.

Untuk membaca hasil riset ini lebih jauh, saat ini dokumen hanya tersedia dalam Bahasa Inggris dan bisa diakses di: <https://www.infid.org/report-research-on-100-hrc-in-indonesia/>. (ADS)

MEMAHAMI PERSPEKTIF LSM DI ASIA TENGGARA DALAM ADVOKASI HAM DAN TPB MELALUI SESI KHUSUS FESTIVAL HAM 2019



Ichal Suprijadi (Sekjen Asia Democratic Network)

Foto: Koleksi Pribadi

Upaya mempromosikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah upaya berkelanjutan yang saat ini banyak dilakukan dengan pendekatan terintegrasi yang menargetkan kebutuhan dasar masyarakat melalui metodologi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sekaligus memperkenalkan Kota HAM.

Asia Democratic Network (ADN) sebagai salah satu aktor yang aktif melakukan kerja advokasi bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menjadi anggota ADN di Asia Tenggara juga melihat kesinambungan antara HAM dan TPB. Hal ini kemudian dituangkan dalam Sesi Khusus Festival HAM di Kota Jember tanggal 19-21 November 2019 yang selain melibatkan anggota ADN, juga melibatkan pemerintah daerah, melalui UCLG ASPAC. ADN berperan sebagai penghubung antara peserta dari pemerintah daerah dan LSM yang hadir agar semua pihak dapat memahami konsep HAM dan Kota HAM, serta menyediakan ruang untuk terbangunnya "trust" dan peluang untuk bekerja sama.

Beberapa waktu yang lalu, Knowledge

Management LOCALISE SDG, Sitti Aminah Syahidah, berhasil mewawancarai Sekjen ADN, Ichal Suprijadi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Sesi Khusus di Festival HAM 2019. Berikut adalah hasil wawancara tersebut:

Localise SDGs (LS): Selamat Siang Pak Ichal, terima kasih atas waktunya. Apa bisa bapak bercerita sedikit soal Sesi Khusus "Regional Networking on Human Rights" dalam Festival Jember ini?

Ichal Supriadi (IS): Sesikhusus pada Festival Jember ini adalah sebuah forum. Ini agak unik, karena di dalamnya terdapat beberapa pilar, UCLG ASPAC (selaku asosiasi Pemerintah Daerah) yang diwakili oleh Wakil Walikota Bandung, ada *International NGO For Indonesia Development* (INFID) yang mewakili *national CSO*, ada *Asia Democracy Network* (AND) yang membawa perwakilan 7 LSM dari Asia Tenggara. Forum ini juga didukung oleh *Raoul Wallenberg Institute of Human Right* (RWI) sebagai pilar terakhir. Keempat pilar saling mendukung dan berkolaborasi untuk melaksanakan forum ini. Kita ingin mengembangkan forum advokasi seperti ini ke tingkat Asia Tenggara, maka pada persiapannya pun banyak koordinasi yang dilakukan oleh keempat pilar ini untuk *building trust*. Kami ingin forum ini jadi *show case* terkait HAM di Indonesia terhadap negara-negara lainnya, yang dalam hal ini diwakili oleh LSM. Pertanyaannya kemudian bagaimana para LSM ini menindaklanjutinya. Yang jelas kegiatan yang dimiliki oleh LSM se-Asia Tenggara ini dapat melengkapi kegiatan HAM yang sudah ada di Indonesia. Tanggapan para LSM ini juga di luar dugaan. Mereka kagum atas *show case* yang muncul dalam forum karena adanya interaksi yang cukup dinamis antara *Civil Society*, *Local Government* bukan hanya *leader*-nya saja tapi juga struktur

dibawahnya serta konsep-konsep isu-isu yang dibawa. Para LSM ini juga kagum karena kolaborasi ini mampu menciptakan kemasan Festival Jember secara keseluruhan yang sangat meriah termasuk keterlibatan anak-anak dan perempuan. Lalu mereka membandingkan dengan kondisi dan situasi di negara masing-masing. Ada Thailand, Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Mereka langsung mengilustrasikan bahwa sebenarnya ini semua bisa mereka lakukan di negara mereka. Jadi ada animo besar bagi mereka yang melaksanakan ini melalui lobi-lobi dan advokasi paling tidak kepada pimpinan daerah, walikota, kepala divisi (jika di Myanmar). Dan mereka juga meminta materi-materi terkait kota HAM dan bagaimana memulai forum seperti ini. Setidaknya Myanmar, Thailand dan Timor Leste sudah menyampaikan keinginanya. Sementara kalau untuk Filipina, mereka sudah memiliki materi dan gerakan kota HAM, tinggal diperluas saja. Kira-kira inilah semua output dari sesi khusus dalam Festival Kota Jember ini. Dalam sesi khusus yang berlangsung lumayan singkat, memang kita tidak mencapai konsensus, tapi dari tanggapan dan reaksi yang disampaikan bernada positif, kira-kira itulah yang tersirat.

LS: Untuk sesi khusus ini, dari yang kami pelajari, memiliki tujuan untuk melihat bagaimana LSM dan pemda dalam mempromosikan HAM sekaligus melaksanakan TPB. Sejauh mana negara lain telah melakukan hal ini?

IS: Iya, konsepnya memang seperti itu. Kita kan melihat semua organisasi dalam posisi yang setara dalam melakukan advokasi di tempat masing-masing dan di lapangan mereka melakukan banyak advokasi

tapi belum terstruktur seperti di Indonesia yang dihubungkan dengan TPB, HAM dan kerja-kerja pemda. Seperti perwakilan Thailand yang berbagi pengalaman dalam *people empowerment* dan Malaysia yang membawa materi tentang *election* yang dikaitkan ke SDGs 16, sebenarnya sudah melakukan advokasi tapi belum terstruktur dan terintegrasi dalam sebuah kerjasama yang komprehensif. Advokasi yang mereka lakukan masih silo, terisolasi dan *scattered*.

LS: Tadi Bapak menyebutkan bahwa advokasi Indonesia terstruktur. Boleh ceritakan case dari kota mana yang menerangkan hal tersebut dan bagaimana?

IS: Menurut saya, dengan adanya Festival Jember ini sudah dengan jelas menyatakan hal tersebut. Apalagi festival ini sudah berlangsung 6 kali. Jadi para LSM ini bertanyatanya, "Selama ini kita kemana saja ya?". Saya sendiri percaya diri untuk mengatakan bahwa keterlibatan pemda di Indonesia dalam ajang seperti ini sudah jauh di depan dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia berada di depan, diikuti oleh Filipina. Namun kita tetap harus menempatkan diri setara dengan yang lain sehingga saat sesi khusus ini pun kami pendekatannya meminta mereka menceritakan advokasi apa saja yang sudah dilakukan, lebih ke *encouragement* bukan *show case*.

LS: Sejauh mana ADN bekerja dalam isu HAM?

IS: ADN memiliki tiga major advocacy: pilar pertama: *democracy-unity-solidarity*, kedua: *youth for democracy advocate*, ketiga: *strengthening local government*. Pilar ketiga ini yang kami jalankan saat ini. Kami mengetahui bahwa pemerintah pusat terbilang lambat dan penuh birokrasi dalam mempromosikan HAM. Maka kami pada tiga tahun yang lalu sepakat untuk melaksanakan terobosan dengan bekerja sama dengan pemda dan lembaga lokal dalam melakukan

advokasi HAM.

Kami juga tergabung dalam Gwangju Human Right Cities Forum. Kami percaya value tersebut. Lalu kami melihat Gwangju sangat elitis, seremonial dan hanya melakukan advokasi di tingkat UN, dan membangun kepercayaan dari pusat, dari menara gading, beraktivitas di pemerintahan tingkat pusat. Maka saat saya datang ke Wonosobo, saya merasa inilah yang pas untuk ADN. Hal ini juga dirasakan oleh LSM yang hadir di Festival Jember kemarin. Inspirasi dari forum seperti Festival Jember ini perlu disampaikan dan dipromosikan kepada banyak pihak agar mereka juga termotivasi untuk melakukan advokasi yang sama di negara mereka. Jadi ya tujuan kita itu saja, agar kita bisa lebih menyelami isu HAM, dan kita tidak boleh menduplikasi upaya yang sudah dilakukan oleh member kita. Jadi jika kita kemudian melakukan advokasi di tingkat Asia Tenggara, posisi kami hanya mempromosikan, menghubungkan dan berkolaborasi. Kita muncul dengan konsep baru.

LS: Artinya konsep kota HAM adalah salah satu advokasi yang dilakukan oleh ADN dengan cara menghubungkan berbagai pihak?

IS: Iya, betul. Kami melihat konsep kota HAM adalah konsep yang brilian.

LS: Pada sesi khusus tadi, hal apa saja yang diperoleh selama diskusi berlangsung yang dapat diformulasikan menjadi *action plan* bersama?

IS: Belum sampai ke *action plan* bersama yang konkret. Hanya lebih ke arah penyampaian ketertarikan untuk mengetahui konsep kota HAM seperti apa, mereka membutuhkan materi, mereka membutuhkan *support* dan *technical advice*, dan mereka akan coba dengan *local*

government yang bisa diajak kerja sama untuk membuat forum seperti ini. Setidaknya sudah ada 4 (empat) LSM di Asia Tenggara yang menyampaikan keinginan tersebut. Dalam interaksi selama sesi khusus dan setelahnya, melalui sesi diskusi informal, mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka lebih fokus ke isu HAM yang *hardcore*, seperti pemenuhan hak sipil. Padahal ada isu sehari-hari dan pemenuhan hal dasar yang juga bisa mereka advokasi, seperti pelayanan publik, akses pada informasi, kesehatan, pendidikan, isu anak dan perempuan yang memang terbilang *soft issue* dan tidak bertentangan dengan kerja-kerja pemda. Dan mereka mendapat inspirasi bahwa kita bisa melakukan advokasi untuk *soft issue* ini karena pemda juga mengadvokasi hal tersebut, dan selama tidak menyentuh isu *hardcore*. Jadi *outcome*-nya adalah pertama terbangunnya kesadaran, kedua adalah terjalannya jaringan (network), misalnya Kota Bandung dan Kota Jember sudah mempersilahkan untuk datang ke Bandung untuk studi banding terkait Kota HAM.

LS: Bagaimana dengan perspektif LSM ini terkait SDGs?

IS: Terkait SDGs, sebenarnya mereka sudah mengetahui tentang SDGs dan mereka terpaku pada pemerintah pusat dan mengeluhkan: tidak ada panduan, belum ada komitmen, belum ada alokasi bujet. Nah saat mereka hadir di Festival Jember, mereka mendapatkan inspirasi bahwa untuk melaksanakan SDGs mereka tidak perlu menunggu panduan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, itu jadi *outcome* ke-3. *Human Right City Advocacy* seperti Festival Jember lah menjadi salah satu model advokasi yang mereka bisa lakukan. (SAS, ADS)

INISIATIF KOTA HAM DI INDONESIA



23 dari 100 kota sampel di Indonesia memiliki kemajuan yang tinggi dalam melaksanakan 12 hak-hak yang tercakup dalam inisiatif kota HAM, komitmen pemerintah, dan institusionalisasi HAM



58 dari 100 kota di Indonesia berpotensi tinggi dalam melaksanakan agenda pembangunan yang ramah HAM.

Tipe 1: Fokus pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, terutama kebutuhan dasar: perdamaian dan keamanan, perlindungan anak, makanan dan air bersih.



Tipe 4: Fokus pada pemenuhan satu hak secara progresif pada satu waktu sebelum fokus ke hak-hak lainnya.

Tipe 2: Fokus pada hak politik dan masyarakat sipil.



Tipe 3: Fokus pada pemenuhan hak politik dan masyarakat sipil dan pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.



Tipe 5: Fokus pada pemenuhan hak berdasarkan isu/sektor.

5 karakter kategori kota:

Sumber: *Research on Progress, Potential and Best Strategy for Implementing and Expanding The Adoption of The Human Rights City Initiative Across Indonesia* (INFID, 2018)

DECade of ACTION



KITA SEMUA HANYA PUNYA WAKTU 10 TAHUN LAGI UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*

PRIORITAS GLOBAL



Mengurangi kesenjangan



Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



Penanganan segera darurat iklim



TPB 2030

3 TINGKAT AKSI YANG PERLU DIDORONG



MASYARAKAT: Oleh kaum muda, masyarakat, media, swasta, akademisi dan pemangku kebijakan lainnya



LOKAL: Melekat kepada kebutuhan adanya transisi kebijakan, penganggaran, lembaga dan kerangka kerja legal pemerintah pusat dan daerah



GLOBAL: Untuk mempertahankan kepemimpinan yang lebih baik, sumber daya yang lebih banyak dan menemukan solusi cerdas bagi tujuan pembangunan berkelanjutan

*Pada tahun 2020, PBB mengkampanyekan Decade of Action untuk mengakselerasi pencapaian TPB (<https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>)